

# RENCANA KERJA (RENJA) 2024



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
DOLOKSANGGUL  
2023



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jl. Sidikalang Km 3,5 Simpang Sitapongan Desa Simangaronsang Doloksanggul  
e-mail : distanhumbanghasundutankab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
**NOMOR : 259 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024;
- b. Bahwa untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;

- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor 3);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 2);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 2);
- 17. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 17);
- 18. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 Nomor 37).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.
- KETIGA :** Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 meliputi :

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Doloksanggul**

**Pada tanggal : Agustus 2023**

**KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN,**



**Ir. JUNTER MAPBUN, MM**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19670409 199302 1 001**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Humbang Hasundutan sebagai laporan
2. Wakil Bupati Humbang Hasundutan sebagai laporan

## KATA PENGANTAR

Pembangunan pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan swasembada pangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program-program pembangunan pertanian secara sistematis dan berkesinambungan.

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai sumber utama pendapatan masyarakat dimana 85 - 90% penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan bermata pencarian sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB tahun 2020 yang mencapai 43,67%.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023 ini diharapkan dapat dipergunakan oleh semua unsur di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam upaya kita bersama untuk mewujudkan swasembada pangan, terima kasih.

Doloksanggul, 20 Juli 2023

**KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN,**



**Ir. JUNTER MARBUN, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670409 199303 1 001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematikan Penulisan .....	3
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.....	 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	 25
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	 27
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	28
3.3 Program dan Kegiatan .....	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	35
BAB V PENUTUP .....	36
Lampiran Tabel TC 33	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sesuai dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 maka Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 adalah 2 OPD yang berdiri sendiri namun setelah terbitnya Perda Nomor 2 Tahun 2021 ini maka kedua OPD ini mengalami peleburan menjadi satu opd yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Dasar penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
17. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan No. 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Tahun 2022 Nomor 11);



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah :

- a. Menjabarkan Renstra Tahun 2021-2026 kedalam rencana program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan tahun 2024 dan mensinkronkan dengan program dan kegiatan dari provinsi maupun pusat.
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam rangka pembangunan daerah.

Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 bertujuan untuk menghadirkan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V. PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sesuai Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 maka Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan 9 Program dan 18 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan.

Tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan adalah melalui evaluasi target dan capaian indikator-indikator kinerja urusan bidang pemerintahan yaitu :

- 1. Persentase kelompok tani yang memperoleh bantuan sarana produksi pertanian;
- 2. Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
- 3. Persentase peningkatan luas lahan yang dilakukan pengendalian OPT;
- 4. Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
- 5. Besaran Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan;
- 6. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan.

Berikut merupakan rangkuman target dan capaian indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di tahun 2023 :

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	Persentasen Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Produksi Pertanian(ton)			
	1. Padi	137.632,86	63.521,3	46,61
	2. Jagung	110.347,25	37.385,7	34,56
	3. Cabai	7.458,62	3.767,06	51,52
	4. Bawang Merah	6.213,78	3.705,3	62,61
	5. Kentang	6.340,72	2.623,7	42,20
	6. Kopi	8.086,61	7.546,21	95,18
2	Jumlah volume perdagangan Padi yang dipasarkan (Ton)			
	1. Padi	134.514,5	53.521,3	56,64
	2. Jagung	105.864,6	37.985,7	36,54
	3. Cabai	7.031, 5	3.097,06	59,50
	4. Bawang Merah	6.024,4	3.875,3	59,61

	5. Kentang	6.057,7	3.623,9	52,20
	6. Kopi	7.090,9	69.546,21	55,18
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,80	81,5	90,50
4	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pertanian	A	A	100



## TABEL TC- 29 REKAPITULASI EVALUASI

### HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

#### DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100 %		15
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase kelompok tani/desa mandiri pangan	Persen	80,00	336.967.007,30	0	474520000		209.230.000,00		Rp -		Rp -					-						
		2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kelompok tani/desa mandiri pangan	poktan	10,00	336.967.007,30		74.324.000		209.230.000,00		Rp -		Rp -					Rp -						
		2.09.02.2.01 .01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan	poktan	10	336.967.007,30	0	400196000	1	209.230.000,00	-	Rp -		Rp -					Rp -						
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PERSENTASE KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN DAN JUMLAH BAHAN PANGAN SEGAR DAN PANGAN OLAHAN YANG AMAN DIKONSUMSI	poktan	80,00	1.261.770.164,60		3189877000		781.795.000,00		Rp -		Rp -					Rp -						
		2.09.03.2.01 Penyediaan DAN Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	jumlah kelompok tani/desa mandiri pangan	poktan	80,00	366.374.919,90	80	139199200		227.490.000,00		Rp -		Rp -					Rp -						
		2.09.02.2.01 .01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	data ketersediaan energi, protein dan lemak	Laporan	12,00	94.134.309,50	12	50000000	12	58.450.000,00		Rp -		Rp -					Rp -						
		2.09.02.2.01 .01 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jenis pangan yang berbasis sumber daya lokal	poktan	80,00	272.240.610,40	3	89199200	13099	169.040.000,00		Rp -		Rp -					Rp -						
		2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	poktan	15,00	230.834.398,30	0	0	10	141.665.000,00		Rp -		Rp -					Rp -						

		2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan Pangan Pemerintah	ton	15,00	230.834.398	0	0	10	143.330.000,00		Rp -		Rp -							Rp -					
		2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi	skore pph konsumsi	skor	89,00	664.560.846,40	86	139199200		412.640.000,00		Rp -		Rp -							Rp -					
		2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah analisis jenis makanan dan jumlah konsumsi energi dan protein keluarga	laporan	1,00	86.830.647	1	50000000		53.915.000,00		Rp -		Rp -							Rp -					
		2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok masyarakat dalam peningkatan diversifikasi pangan	kelompok	25,00	577.730.200	5	89199200		358.725.000,00		Rp -		Rp -							Rp -					
		<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	laporan data daerah rawan pangan	Persen	80,00	312.307.171,00	80	264449800	80	<b>213.310.000,00</b>		Rp -		Rp -							Rp -					
		2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupate/Kota	laporan data daerah rawan pangan	Laporan	1,00	312.307.171,00	1	264449800	1	213.310.000,00		Rp -		Rp -							Rp -					
		2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	laporan data daerah rawan pangan	Laporan	1,00	312.307.171,00	1	264449800	1	213.310.000,00		Rp -		Rp -							Rp -					
		<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi	Persen	60,00	169.793.141,10	60	116481216		<b>110.000.000,00</b>		Rp -		Rp -							Rp -					
		2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Kemanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi PSAT yang telah diuji	sampel	5,00	169.793.141,10	2	116481216		110.000.000,00		Rp -		Rp -							Rp -					
		2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Aman dikonsumsi	rekomendasi	5,00	73.629.589,00	1	58379186		50.290.000,00		Rp -		Rp -							Rp -					
		2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian kuantitatif PSAT	set	250,00	96.163.552,10	1	58102030		59.710.000,00		Rp -		Rp -							Rp -					
<b>II</b>	<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan ASN terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>%</b>	<b>90,00</b>	<b>44.566.943.300,00</b>	<b>78</b>	<b>15.123.440.714,00</b>	<b>80</b>	<b>10.433.748.427</b>	<b>20,00</b>	<b>Rp 781.400.861</b>		<b>Rp 2.910.590.261</b>							<b>Rp 3.691.991.122</b>					
		3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Perencanaan, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat waktu	%	100,00	175.000.000	100	30.997.000	100	24.352.000	25,00	Rp -		Rp -							Rp -					

		3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Renja Terhadap Renstra	%	100,00	100.000.000,00	100	17.693.000	100,00	17.701.000	25,00	Rp -		Rp -							Rp -					
		3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Yang Tepat Waktu	%	100,00	75.000.000,00	100	13.304.000	100,00	6.651.000	25,00	Rp -		Rp -							Rp -					
		3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi keuangan Program dan Kegiatan	%	100,00	36.630.600.000,00	20	5.884.688.214	20,00	8.404.341.324	5,00	Rp 781.400.861		Rp 2.817.064.197							Rp 3.598.465.058					
		3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Orang	305,00	7.326.120.000,00	61	5.884.688.214	61,00	8.385.582.124	61,00	Rp 781.400.861	Rp 61	Rp 2.812.864.197							Rp 3.594.265.058					
		3.27.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Yang disusun tepat waktu	Laporan	10,00	100.000.000,00	2	16.915.400	2,00	18.759.200	-	Rp -		Rp 4.200.000							Rp 4.200.000					
		3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Kepuasan ASN	%	100,00	434.875.000,00	20	86.000.000	20,00	101.500.000	-	Rp -		Rp -							Rp -					
		3.27.01.2.05.02 Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Stel	330,00	259.875.000,00	66	51.000.000	66,00	66.500.000	-	Rp -		Rp -							Rp -					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase ASN yang lulus dengan nilai memuaskan	Orang	20,00	175.000.000,00	4	35.000.000	4,00	35.000.000	-									Rp -						
		3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Atas Jasa, Sarana dan Prasarana Kantor	Persen	100,00	5.775.000.000,00	20	715.536.186	20,00	1.165.094.659	5,00	Rp -		Rp 68.000.000							Rp 68.000.000					
		3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik yang tersedia	Jenis	4,00	25.000.000,00	4	3.154.150	4,00	12.504.700	4,00	Rp -		Rp -							Rp -					
		3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	3,00	2.500.000.000,00	3	117.708.536	3,00	431.033.259	3,00	Rp -		Rp -							Rp -					
		3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan	Jenis	3,00	250.000.000,00	3	40.800.000	3,00	44.315.000	3,00	Rp -		Rp -							Rp -					
		3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	Jenis	8,00	250.000.000,00	8	49.818.000	8,00	47.200.200	2,00	Rp -		Rp -							Rp -					
		3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Jenis	2,00	250.000.000,00	2	31.499.500	2,00	67.499.500	2,00	Rp -		Rp -							Rp -					

		3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penugasan Dinas ke Dalam dan Luar Daerah	Kali	2.650,00	2.500.000.000,00	544	472.556.000	530,00	562.542.000	79,00	Rp -		Rp 68.000.000						Rp 68.000.000					
		3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Dinas Pertanian yang Bertambah	Unit	48,00	1.231.468.300,00	4	294.920.000	20,00	266.002.000	-	Rp -		Rp -						Rp -					
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang bertambah	Unit	30,00	1.000.000.000,00	1	264.920.000	10,00	240.000.000	-	Rp -		Rp -						Rp -					
		3.27.01.2.07. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Baqngunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang tersedia	Unit	18,00	231.468.300,00	3	30.000.000	3,00	30.000.000	-	Rp -		Rp -						Rp -					
		3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	320.000.000,00	20	59.927.244	20,00	145.198.444	5,00	Rp -		Rp 2.026.064						Rp 2.026.064					
		3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	Buah	1.685,00	10.000.000,00	100	1.948.000	641,00	7.395.000	100,00	Rp -		Rp -						Rp -					
		3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air minum/Air Bersih dan Jasa Telekomunikasi yang tersedia	Jenis	2,00	200.000.000,00	2	37.199.244	2,00	128.199.244	2,00	Rp -		Rp 2.026.064						Rp 2.026.064					
		3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan Umum kantor	Orang	20,00	110.000.000,00	4	20.780.000	3,00	35.000.000	3,00	Rp -		Rp -						Rp -					
		3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100,00	1.446.412.200,00	20	238.320.000	20,00	327.260.000	5,00	Rp -		Rp 23.500.000						Rp 23.500.000					
		3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala	Unit	1,00	192.100.000,00	1	38.420.000	1,00	78.420.000	1,00	Rp -		Rp 23.500.000						Rp 23.500.000					
		3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala	Unit	41,00	1.000.000.000,00	41	164.440.000	41,00	194.440.000	41,00	Rp -		Rp -						Rp -					
		3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Unit	105,00	100.000.000,00	21	15.460.000	22,00	34.400.000		Rp -		Rp -						Rp -					
		3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah item gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Unit	1,00	154.312.200,00	1	20.000.000	1,00	20.000.000		Rp -		Rp -						Rp -					



	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang Memperoleh Bantuan Sarana Produksi Pertanian	%	100,00	115.996.900.000,00	20	17.929.314.300	20,00	13.678.545.600	-	Rp -	Rp 691.176.450							Rp 691.176.450					
		3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	%	100,00	54.945.900.000,00	100	8.475.156.700	100,00	11.445.217.000	-	Rp -	Rp 627.426.450							Rp 627.426.450					
		3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	%	100,00	54.945.900.000,00	100	8.475.156.700	100,00	11.445.217.000	-	Rp -	Rp 627.426.450							Rp 627.426.450					
		3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pertanaman Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Hektar	39.000,00	61.051.000.000,00	4.157	9.454.157.600	775,00	2.233.328.600	-	Rp -	Rp 63.750.000							Rp 63.750.000					
		3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Luas Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Hektar	39.000,00	61.051.000.000,00	4.157	9.454.157.600	775,00	2.233.328.600	-	Rp -	Rp 63.750.000							Rp 63.750.000					
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	5,00	37.052.550.000,00	1	4.127.876.850	1,00	19.198.480.200	-	Rp -	Rp 20.140.000							Rp 20.140.000					
		3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen/Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen/Laporan	12,00	3.052.550.000,00	3	938.224.300	3,00	316.436.200	-	Rp -	Rp -							Rp -					
		3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah database Pertanian yang disusun	Dokumen/Laporan	12,00	3.052.550.000,00	3	938.224.300	3,00	316.436.200	-	Rp -	Rp -							Rp -					
		3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang dibangun	Unit	92,00	34.000.000.000,00	12,00	3.189.652.550,00	54,00	18.882.044.000,00	-	Rp -	Rp 20.140.000							Rp 20.140.000					
		3.27.03.2.02.01 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	Unit	10,00	3.000.000.000,00	2	525.000.000	2,00	787.500.000	-	Rp -	Rp -							Rp -					
		3.27.03.2.02.03 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun	Unit	25,00	2.500.000.000,00	8	1.686.703.150	29,00	6.287.500.000	-	Rp -	Rp 15.940.000							Rp 15.940.000					
		3.27.03.2.02.08 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang dibangun	Unit	7,00	3.500.000.000,00	2	977.949.400	3,00	1.807.044.000	-	Rp -	Rp -							Rp -					

		3.27.03.2.02.09 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang dibangun	Unit	50,00	25.000.000.000,00	-	-	20,00	10.000.000.000	-	Rp -	Rp 4.200.000							Rp 4.200.000					
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Peningkata Luas Lahan yang dilakukan Pengendalian OPT</b>	<b>%</b>	<b>50,00</b>	<b>4.884.080.000,00</b>	<b>5</b>	<b>375.286.700</b>	<b>10,00</b>	<b>740.757.600</b>	<b>-</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>							<b>Rp -</b>					
		3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertanian yang dilakukan pengendalian OPT	Ha	25,00	4.884.080.000,00	5	375.286.700	5,00	740.757.600	-	Rp -	Rp -							Rp -					
		3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Luas Lahan Pertanian yang dilakukan pengendalian OPT	Ha	2.610,00	4.884.080.000,00	210	375.286.700	300,00	740.757.600	-	Rp -	Rp -							Rp -					
		<b>PROGRAM PRNYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase Kelompok Tani yang menerapkan teknologi anjuran</b>	<b>%</b>	<b>25,00</b>	<b>8.400.000.000,00</b>	<b>5</b>	<b>1.626.191.200</b>	<b>5,00</b>	<b>124.500.900</b>	<b>-</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 293.340.000</b>							<b>Rp 293.340.000</b>					
		3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerima penyuluhan pertanian	%	100,00	8.400.000.000,00	20	1.626.191.200	20,00	124.500.900	-	Rp -	Rp 293.340.000							Rp 293.340.000					
		3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	%	50,00	7.500.000.000,00	10	1.474.844.800	2,00	34.500.000	-	Rp -	Rp 124.880.000							Rp 124.880.000					
		3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Pengembangan Pengetahuan dan Ketrampilan Penyuluh Pertanian	%	100,00	150.000.000,00	10	20.570.400	30,00	900	-	Rp -	Rp 138.760.000							Rp 138.760.000					
		3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah PPL yang memiliki Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Orang	27,00	750.000.000,00	25	130.776.000	27,00	90.000.000	-	Rp -	Rp 29.700.000							Rp 29.700.000					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										46.860.712.627,00		781.400.861	-	3.915.246.711						4.696.647.572		-	-	-	



2.2. Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

a. Padi

Tabel 1. Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 – 2021

No	Komoditi	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi Sawah	Luas Tanam (Ha)	18.221,70	18.849,30	17.698,00	18.607,80	18.232,90
		Luas Panen (Ha)	18.656,10	17.981,00	19.579,50	18.332,00	18.594,00
		Produksi GKP (Ton)	108.996,04	103.729,33	111.404,79	105.106,76	97.513,57
		Produktivitas (Kw/Ha)	58,42	57,68	56,90	57,34	57,55
2	Padi Ladang	Luas Tanam (Ha)	2.259,00	16.977,70	6.365,80	6.125,70	6.888,00
		Luas Panen (Ha)	3.693,00	11.316,50	10.625,10	6.896,90	6.713,00
		Produksi GKP (Ton)	15.575,44	48.992,46	42.814,88	28.478,33	28.507,44
		Produktivitas (Kw/Ha)	42,18	43,29	40,30	41,29	42,47
	Total Padi	Luas Tanam (Ha)	20.480,70	35.827,00	24.063,80	24.733,50	25.120,90
		Luas Panen (Ha)	22.349,10	29.297,50	30.204,60	25.228,90	25.307,00
		Produksi GKP (Ton)	124.571,65	152.721,80	154.219,70	133.585,10	135.522,33
		Produktivitas (Kw/Ha)	55,74	52,13	51,06	52,95	53,55

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi peningkatan produksi padi yang signifikan bahkan cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan belum adanya varietas unggul padi dataran tinggi yang sesuai dengan wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga petani masih menggunakan benih local yang sudah turun temurun sehingga produktivitasnya rendah.

Rata – rata produktivitas padi di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021 adalah 57,33 Kw/Ha, masih dibawah produktivitas nasional apalagi dibandingkan dengan pulau jawa. Kemudian dilihat dari perbandingan antara luas panen dan luas sawah maka indeks pertanaman masih dibawah 2 yang artinya masih ada lahan yang hanya ditanami kali setahun. Hal ini diakibatkan sebahagian dari perswahan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah tadah hujan dan irigasi yang belum berfungsi secara maksimal.

b. Jagung

Tabel 2. Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 – 2021.

Komoditi	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jagung	Luas Tanam (Ha)	3.047,10	13.410,40	12.584,30	14.321,20	14.466,70
	Luas Panen (Ha)	2.227,70	10.206,70	14.641,40	14.792,70	14.637,40
	Produksi (Ton)	13.156,00	61.581,77	99.028,68	103.982,68	105.203,55
	Produktivitas (Kw/Ha)	59,06	60,33	67,64	70,29	71,87

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa produksi jagung di Kabupaten Humbang Hasundutan sangat signifikan hal ini disebabkan adanya peningkatan luas tanam dan luas panen dari tahun ke tahun. Hal ini didukung adanya Program Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai yang disingkat UPSUS PAJALE pada Tahun 2017 – 2018 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian untuk seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

2. Tanaman Hortikultura

Subsektor hortikultura merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan sumber utama mata pencaharian bagi petani khususnya di kecamatan dataran tinggi yakni doloksanggul, pollung, sijamapolang, paranginan dan lintongniguta. Adapaun data produksi komoditi unggulan hortikultura tahun 2021 di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :

Tabel 3. Produksi Tanaman Hortikultura Unggulan di Kabupaten  
Humbang Hasundutan menurut Jenis Komoditi Tahun 2017-2021

No	Jenis Komoditi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cabai	7.560,30	5.340,50	5.474,70	7.028,43	7.957,93
2.	Bawang Merah	1.015,30	1.378,40	1.580,20	1.534,50	13.283,90
3.	Kentang	2.180,90	4.282,00	3.851,10	5.975,00	9.023,10
4.	Tomat	3.684,70	4.088,20	7.849,90	6.451,50	6.399,10
5.	Kubis	5.087,10	6.306,00	5.102,70	6.906,20	10.314,20

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa produksi tanaman hortikultura umumnya mengalami peningkatan produksi dari tahun ke tahun. Khusus untuk tanaman bawang merah mengalami peningkatan produksi yang sangat signifikan pada tahun 2021, hal ini disebabkan adanya dukungan anggaran untuk pengembangan bawang merah baik yang bersumber dari dana APBD Kab. Humbang Hasundutan, APBD Provinsi maupun APBN T.A 2020 dan 2021.

### 3. Tanaman Perkebunan

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsector yang mengalami pertumbuhan paling konsisten, baik ditinjau dari areal maupun produksi. Dengan pertumbuhan yang cukup konsisten, subsektor perkebunan mempunyai peran strategis, baik dalam pembangunan ekonomi secara nasional maupun dalam menjawab isu – isu global. Subsektor perkebunan berperan dalam penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, sumber devisi, pengentasan kemiskinan dan konservasi lingkungan.

Beberapa produk perkebunan Kabupaten Humbang Hasundutan seperti kopi, karet, tembakau, kelapa sawi dan kakao, diakui memiliki keunggulan komparatif di pasar internasional sehingga peluang produk dalam negeri untuk masuk pasar internasional terbuka cukup lebar. Tanaman perkebunan di Kabupaten Humbang Hasundutan diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat dengan skala usaha kecil. Gambaran luas areal dan produksi perkebunan tahun 2019 s.d 2021 di Kabupaten Humbang Hasundutan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Humbang  
Hasundutan menurut Jenis Komoditi Tahun 2018 - 2021

No	Jenis Komoditi	2018		2019		2020		2021	
		Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)
1	Kopi	11.494,50	7.067,36	12.113,49	7.385,94	12.309,09	7.546,21	12.445,84	7.774,57
2	Karet	4.296,23	2.422,93	4.357,60	2.306,50	4.266,40	2.313,01	4.012,40	2.239,16
4	Kakao	1.559,17	577,82	1.472,42	522,24	1.472,52	525,44	1.436,42	543,33
5	Kelapa	422,05	544,06	405,70	201,86	408,10	203,68	382,00	210,65
6	Kelapa Sawit	369,78	385,82	399,65	470,80	471,70	1.484,00	554,95	564,50
7	Kemenyan	4.886,10	1.285,48	399,65	470,80	4.837,50	1.087,56	4.986,00	1.107,11
8	Aren	223,95	123,36	235,58	126,29	242,45	126,56	239,66	130,01
9	Tembakau	201,00	95,59	172,74	196,73	175,00	200,82	174,28	213,69
10	Nilam	98,00	80,19	61,60	50,15	32,00	21,18	32,00	21,18

Secara umum dapat digambarkan bahwa tanaman kopi adalah tanaman perkebunan utama di Kabupate Humbang Hasundutan, seperti terlihat pada table diatas. Tanaman kopi adalah unggulan pertama perkebebanan. Komoditi kopi tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu Lintongnihuta, Paranginan, Doloksanggul, Pollung, Onan Ganjang dan Sijamapolang. Diusahai kurang lebih 28.374 Kepala Keluarga Petani Kopi. Perkebunan kopi masih merupakan perkebunan rakyat . Produksi kopi dari perkebunan rakyat tersebut dipasarkan ke pasar local dan sudah mulai merambah ke pasara internasional.

Tanaman karet merupakan komoditas perkebunan unggulan setelah kopi. Komoditi karet diusahai kurang lebih 3.071 Kepala Keluarga petani karet. Perkebunan karet masih merupakan perkebunan rakyat. Produksi karet dari perkebunan rakyat tersebut dipasarkan ke pasar local dank e industri karet remah (crumb rubber) dalam bentuk bahan olahan karet rakyat (bokar) untuk diolah lebih lanjut. Secara umum kondisi perkebunan karet di Kabupaten Humbang Hasundutan dari tahun 2018 – 2021 cenderung mengalami penurunan baik dari segi luas areal maupun produksi. Hal ini disebabkan karena selama periode waktu tersebut harga karet mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga banyak petani karet yang tidak lagi mengusahai perkebunan karetnya.

Potensi unggulan ketiga adalah kakao, diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah (raw material export). Potensi kakao tersebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang.

4. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Produktivitas dan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan harga berlaku, sebagai berikut :

Tabel. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan harga berlaku Tahun 2016 – 2020;

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45,46	44,44	44,02	43,41	43,67

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan.

Analisa Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dapat dilihat pada Tabel TC. 30 dibawah ini :



**Tabel TC - 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian**  
**Kabupaten Humbang Hsundutan**

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Proyeksi					Cata tan Anal isis
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
	Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan													
			Produksi Padi (Ton)	127.463,73	130.013,00	132.613,26	135.265,53	137.970,84	124.571,65	152.548,00	141.548,00	133.585,10	135.522,33	
			Produksi Jagung (Ton)	10.000,00	50.000,00	73.898,12	77.593,03	57.881,25	13.156,00	60.548,40	99.028,69	103.982,68	105.203,55	
			Produksi Cabai (Ton)	6.433,66	6.562,33	5.447,31	5.556,27	7.596,70	7.560,60	5.340,5	5.474,70	7.028,43	7.957,93	
			Produksi Bawang Merah (Ton)	1.066,06	1.119,36	1.077,45	1.098,10	1.295,78	1.378,40	1.580,2	1.534,50	5.367,70	13.283,90	
			Produksi Kentang (Ton)	1.792,56	1.882,18	4.367,64	4.454,10	2.178,84	2.180,90	4.282,0	3.851,10	5.975,00	9.023,10	

			Produksi Jeruk (Ton)	1.4911,10	1.565,65	5.619,59	5,731,98	1.812,42	2.488,50	5.509,40	6.661,20	6.825,65	6.825,65	
			Produksi Durian (Ton)	3.463,84	3.6370,03	3.818,88	4.009,82	4.210,31	1.066,40	3.220,90	3.818,88	4.026,43	4.026,43	
			Produksi Kopi (Ton)	6.963,93	7.312,12	7.038,28	7.179,05	8.464,68	7007,10	7.067,36	7.385,94	7.546,21	7.774,57	
			Produksi Tembakau (Ton)	98,89	103,83	99,94	101,94	120,19	120,60	95,59	196,73	200,82	213,69	

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			Capaian Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	90%		74	74	76	78	79	70,60	70,76	69,54	71,67	76	78	79	76
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Pangan	90%		72,80	76,42	78,71	81,07	83,50	71,40	76,48	78,20	81	78,71	81,07	83,50	78,20
3.	Nilai Capaian Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan	80%		B	B	BB	BB	BB	C	CC	BB	A	B	BB	BB	B

### **2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini berdasarkan pada berbagai isu strategis/permasalahan yang berkembang baik dari lingkungan internal maupun eksternal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang tentunya berhubungan dan berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Isu strategis ini sangat perlu mendapat perhatian, karena akan berpengaruh positif dan negative terhadap kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Apabila isu strategis ini tidak diadaptasi dan disiasati pemecahannya akan dapat menimbulkan kerugian dan hambatan bagi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan tentu dapat menghilangkan peluang untuk peningkatan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Identifikasi permasalahan didasarkan atas hasil analisa gambaran pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, analisis Renja tahun – tahun sebelumnya, analiasi Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bahkan analisa atas RTRW Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :

1. Terbatasnya modal dan pengetahuan petani dalam pengelolaan usaha taninya;
2. Petani belum melaksanakan teknologi anjuran dan kegiatan usahan taninya;
3. Rendahnya SDM aparatur baik kwanntitas maupun kualitas untuk penyuluhan pertanian;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan usaha taninya;
5. Pengusahaan lahan masih terbatas dan komoditi yang dikembangkan berakaragam dalam satu hamparan;
6. Komoditas – komoditas yang dihasilkan petani belum mampu berdaya saing di pasar lokal, regional dan internasional;
7. Kontuinitas komoditas belum tersedia dan terjaga;
8. Ketergantungan petani akan agrochemical anorganik yang sangat tinggi.¶

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselisaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negative bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan pertanian yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, maka ditetapkan isu – isu strategis pembangunan pertanian Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;
2. Perbaikan infrastruktur pertanian di perdesaan;

3. Peningkatan ketersediaan sarana produksi;
4. Peningkatan akses permodalan petani;
5. Peningkatan akses pemasaran hasil pertanian;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian
7. Peningkatan mutu dan keamanan pangan;
8. Penguatan daya saing ekonomi;
9. Penguatan kelembagaan petani;
10. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

##### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan”**, yang dijabarkan menjadi 7 prioritas nasional di tahun 2023, yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
6. Ekonomi Hijau
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021-2026 dalam dokumen RPJMD 2021-2026 adalah: **“MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG MAJU DAN BERMENTALITAS UNGGUL”**.

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi kreatif, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal;
4. Mewujudkan infrastruktur yang berasaskan kebermanfaatan dan pemerataan;

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk pada Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Peraturan Bupati HumbangHasundutan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan urusan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan sehingga program kegiatan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan **mendukung misi ke-3**.

Adapun Tema RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023 adalah ***“Optimalisasi Daya Saing Pertanian dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Berbasis Inovasi dan SDM Unggul serta Infrastruktur yang berkeadilan”*** dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM;

Sasaran dan arah kebijakan prioritas ;

1. Meningkatnya mutu pendidikan.
  - a. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran Paud, SD, dan SLTP;
  - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
  - c. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. Peningkatan budaya baca;

2. Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat
  - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis;
  - b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar;
  - c. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan balita;
  - d. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  - e. Peningkatan mutu layanan kesehatan hingga di Tingkat Desa;
  - f. Peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat;
  - g. Peningkatan kolaborasi antara dunia kesehatan dan keluarga dengan membudayakan hidup sehat;
  - h. Menekan Laju pertumbuhan penduduk.
2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertanian dan Ekonomi Kreatif;
 

Sasaran dan arah kebijakan prioritas :

  1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
    - a. Peningkatan produksi pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan penggunaan mekanisasi dan teknologi pertanian;
    - b. Peningkatan; kualitas penyuluhan;
    - c. Peningkatan akses Petani ke pembiayaan yang terjangkau;
    - d. Pembinaan Kelompok Tani;
    - e. Perwujudan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan;
    - f. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
    - g. Pengembangan ekonomi inklusif dengan penguatan sektor unggulan dan penguatan pelayanan investasi;
    - h. Peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif;
    - i. Pengembangan pariwisata dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pariwisata, pengelolaan destinasi wisata yang professional;
    - j. Penciptaan iklim investasi pariwisata dengan memperhatikan kearifan lokal berbasis pengembangan ekonomi kreatif rakyat.

### 3. Peningkatan Infrastruktur, pengembangan wilayah dan tata ruang;

Sasaran dan arah kebijakan prioritas :

#### 1. Meningkatkan Infrastruktur Jalan

- a. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang bermanfaat hingga ke dusun;
- b. Peningkatan pembangunan Alat Keselamatan Jalan;
- c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum untuk kemudahan Akses hingga ke desa.

#### 2. Meningkatkan Infrastruktur SDA

- a. Peningkatan pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian;
- b. Peningkatan pembangunan Drainase Perkotaan dan Perdesaan;
- c. Peningkatan Kelembagaan P3A dalam memelihara Jaringan Irigasi.

#### 3. Meningkatkan Infrastruktur PSU.

- a. Peningkatan jumlah fasilitas pengumpulan sampah di kawasan permukiman;
- b. Peningkatan cakupan air limbah aman;
- c. Penanganan kawasan kumuh secara terpadu ;
- d. Peningkatan infrastruktur penyediaan air Minum hingga ke dusun;
- e. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.

#### 4. Meningkatkan kualitas Lingkungan hidup

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Penegakan Peraturan terkait Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang;
- c. Peningkatan Penanganan Persampahan.

### 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif;

Sasaran dan arah kebijakan prioritas :

#### 1. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan

- a. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan ;
- b. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Perencanaan, Keuangan dan Pelaksanaan;



- c. Penguatan agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas implementasinya melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis berbasis e-Government;
  - d. Penguatan budaya pembaharuan sistem kepemimpinan agar lebih visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif melalui peningkatan kompetensi ASN dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis aplikasi online.
2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
    - a. Peningkatan pengawasan oleh inspektorat yang efektif dan efisien;
    - b. Peningkatan Kualitas antar Dokumen Perencanaan ;
    - c. Peningkatan capaian kinerja pemerintah daerah.
  3. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
    - a. Peningkatan Kualitas pengelolaan Pendapatan dan Keuangan daerah;
    - b. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset dan kuantitas pendapatan daerah;
    - c. Penguatan sistem nilai budaya kerja dan integritas birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis.
  4. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik yang inovatif
    - a. Perluasan cakupan pelayanan publik yang berbasis IT;
    - b. Perwujudan Mal Pelayanan Publik;
    - c. Peningkatan kualitas ASN dengan penerapan merit sistem dengan dukungan aplikasi e-kinerja;
    - d. Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi-inovasi daerah;
    - e. Peningkatan Teknologi Informasi untuk mempermudah pelayanan, Administrasi dan inovasi daerah.
  5. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat
    - a. Meningkatkan penegakan perda;
    - b. Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan (K3);
    - c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan.

6. Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
    - a. Penguatan kapasitas Kelompok Sadar Bencana;
    - b. Penguatan kapasitas Tanggap dan Tangguh Bencana hingga ke Desa;
    - c. Penurunan tingkat resiko bencana;
    - d. Peningkatan penyediaan sarana penanggulangan bencana kebakaran;
  7. Meningkatkan Kapasitas Perlindungan Masyarakat
    - a. Peningkatan penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak;
    - b. Pembinaan terhadap Masyarakat hingga ke tingkat desa;
5. Penanggulangan kemiskinan
- Sasaran dan arah kebijakan prioritas :
1. Menurunnya jumlah masyarakat miskin
    - a. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan bantuan/jaminan social bagi warga miskin;
    - b. Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin;
    - c. Peningkatan pemberdayaann masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi.
  2. Menurunnya Jumlah Pengangguran
    - a. Penciptaan lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya;
    - b. Penciptaan lapangan pekerjaan baru dari Sektor Industri;
    - c. Pelatihan Keterampilan bagi angkatan kerja sebagai modal berwirausaha;
    - d. Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja.

**Tujuan OPD :**

Penetapan tujuan organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor – faktor kunci yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, karena dengan mengetahui faktor – faktor kunci keberhasilan berarti organisasi tersebut telah mengetahui kekuatan untuk mencapai apa yang akan dicapai.

Adapun tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan dikaitkan dengan Pencapaian Visi dan Misi Bupati Humbang Hasundutan yang ditetapkan adalah **“Meningkatnya Pendapatan Petani”**

**Sasaran OPD :**

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah

1. Meningkatkan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2. Meningkatkan Pemasaran Hasil Pertanian
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

### **3.3. Program dan Kegiatan**

#### **3.3.1. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan**

Dalam perwujudan visi daerah untuk mencapai Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul dibutuhkan kebijakan daerah melalui program dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan visi tersebut. Bupati Humbang Hasundutan memiliki empat misi dengan enam belas sasaran. Dimana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki andil pada misi ketiga. Dengan 3 sasaran yakni:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Menurunkan jumlah masyarakat miskin;
3. Menurunkan jumlah pengangguran.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mendukung tercapainya misi Ketiga mempunyai andil dalam Meningkatkan pendapatan masyarakat yakni dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi dan memberikan subsidi dalam penggunaan traktor dan excavator dalam pembukaan dan pengolahan lahan sehingga dapat menurunkan ongkos produksi.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan pada T.A 2023 adalah :

#### **A. Program Penunjang**

##### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

#### **B. Program Prioritas**

##### **1. Urusan Bidang Pangan**

##### **I. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi

## **II. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

## **III. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

## **2. Bidang Pertanian**

### **I. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kabupaten/Kota

### **II. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

1. Pembangunan Prasarana Pertanian

### **III. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota

### **IV. Program Penyuluhan Pertanian**

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2023 melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka disusunlah Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel TC-33 (Lampiran).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Program Kerja agar mampu eksis dan tangguh dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan secara terus menerus mengadakan perubahan ke arah perbaikan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang ada.

Pembangunan Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan perlu melibatkan instansi terkait yang dianggap dapat mendukung program pertanian sehingga pemenuhan kebutuhan pangan dapat teratasi. Rencana kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Humbang Hasundutan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi Tujuan, Target, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Oleh karena itu Dokumen Renja diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian secara menyeluruh dan sinergi antar sektor terkait sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terwujudnya Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul dapat tercapai.

Demikian Rencana Kerja (Renja) dibuat untuk bahan dalam Penyempurnaan Program Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024, semoga Tuhan Yang Maha Pengasihmemberkati Kita semua.

**KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN,**



**Ir. JUNTER MARBUN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670409 199302 1 001**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KABUPATEN HUMBANG HUMBANG HASUNDUTAN  
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	SASARAN KEGIATAN	Formula Perhitungan	RENCANA TAHUN 2024				
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
I	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Indeks Ketahanan Pangan	Masyarakat	Survey Ketahanan Pangan	Kabupaten Humbang Hasundutan	75	Indeks	424.082.400	DAU
	1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Pedagang/OPD Terkait/Gapoktan/Poktan	Hasil Survey Harga dan Perhitungan Neraca Bahan Makanan (Aplikasi)	Kabupaten Humbang Hasundutan	79	Skor	194.648.400	DAU
	1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Pedagang / OPD Terkait	Survey Informasi Harga Pangan dan Penghitungan Neraca Bahan Makanan	Kabupaten Humbang Hasundutan	2	Laporan	55.602.400	DAU
	1.2	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang dikembangkan	Gapoktan/Poktan	Jumlah Gapoktan/Poktan yang dikembangkan	Kabupaten Humbang Hasundutan	2	unit	139.046.000	DAU
	2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Daerah Rawan/Rentan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Tahun n dibagi Jumlah Cadangan Pangan Total dikali 100 %	Kabupaten Humbang Hasundutan	10,79	Persen	141.665.000	DAU
	2.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang tersedia	Daerah Rawan/Rentan Pangan	80% x cadangan beras total provinsi x rasio jumlah penduduk kab/kota terhadap jumlah penduduk provinsi	Kabupaten Humbang Hasundutan	10	Ton	141.665.000	DAU
	3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skore PPH Komsumsi	Masyarakat/KWT/Poktan	Survey PPH Konsumsi	Kabupaten Humbang Hasundutan	Skore	80	87.769.000	DAU



	3.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Masyarakat	Survey PPH Konsumsi	Kabupaten Humbang Hasundutan	1	Dokumen	39.246.000	DAU
	3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelompok Wanita Tani/ Kelompok Tani	Jumlah Pemanfaatan P2L	Kabupaten Humbang Hasundutan	1	Laporan	48.523.000	DAU
II	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Penanganan Desa Rawan/Rentan Pangan	Balita gizi buruk/kurang/stunting/desa rentan pangan/ OPD terkait	Jumlah Desa Rentan Pangan yang ditangani dibandingkan dengan jumlah daerah rentan pangan seluruhnya dikali 100 %	Kabupaten Humbang Hasundutan	6,89	%	165.100.800	DAU
	1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan/Rentan Pangan yang ditangani	balita gizi buruk/kurang/stunting/desa rentan pangan/ OPD terkait	Data Desa Rentan Pangan	Kabupaten Humbang Hasundutan	10	Desa	165.100.800	DAU
	1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	balita gizi buruk/kurang/stunting/desa rentan pangan/ OPD terkait	Data Desa Rentan Pangan	Kabupaten Humbang Hasundutan	1 laporan	1 laporan	165.100.800	DAU
III	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi	Poktan, pedagang	Jumlah Pangan PSAT Aman dibandingkan dengan Jumlah Sampel yang diuji	Kabupaten Humbang Hasundutan	80	Persen	87.291.200	DAU
	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi	Poktan, pedagang	Jumlah Sampel PSAT yang diuji	Kabupaten Humbang Hasundutan	4	Komoditi	87.291.200	DAU
	1.1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Poktan, pedagang	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kabupaten Humbang Hasundutan	1	Dokumen	87.291.200	DAU
IV	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kepuasan ASN terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase Kepuasan ASN terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	100	Persen	9.530.838.043	DAU
	1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Perencanaan, Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun	Dinas Pertanian	100	Persen	14.350.000	DAU
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dinas Pertanian	2	Dokumen	7.699.000	DAU

	1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun	Dinas Pertanian	3	Laporan	6.651.000	DAU
	2	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu</b>	<b>Dinas dan Ketahanan Pangan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>7.646.222.360</b>	<b>DAU</b>
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Dinas Pertanian dan Ketahaan Pangan	Jumlah ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	78	Orang/Bulan	7.637.484.360	DAU
	2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2	Laporan	8.738.000	DAU
	4	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Persentase Pemenuhan atas Jasa, Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>	<b>Persentase Pemenuhan atas Jasa, Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>	<b>95</b>	<b>Persen</b>	<b>800.188.239</b>	<b>DAU</b>
	4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	Paket	5.422.500	DAU
	4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	Paket	150.431.239	DAU
	4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	Paket	39.050.000	DAU
	4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	Paket	39.598.500	DAU
	4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	Dokumen	39.660.000	DAU
	4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	Laporan	526.026.000	DAU
	5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah Aset Dinas Pertanian yang bertambah</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>	<b>Jumlah Aset Dinas Pertanian yang bertambah</b>	<b>Dinas dan Ketahanan Pangan</b>	<b>4</b>	<b>unit</b>	<b>641.360.000</b>	<b>DAU</b>

	5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang bertambah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6	unit	641.360.000	DAU
	6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>	<b>Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dinas dan Ketahanan Pangan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>119.647.444</b>	<b>DAU</b>
	6.1	Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat - Menyurat yang disediakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat - Menyurat yang disediakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	Laporan	5.500.000	DAU
	6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	Laporan	114.147.444	DAU
	7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Dinas dan Ketahanan Pangan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>309.070.000</b>	<b>DAU</b>
	7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	Unit	38.420.000	DAU
	7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	45	Unit	186.940.000	DAU
	7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	48	Unit	34.120.000	DAU
	7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	unit	49.590.000	DAU
V	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>		<b>Persentase Kelompok Tani yang Memperoleh Bantuan Sarana Pertanian</b>	<b>Kelompok Tani</b>	<b>Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan dibagi Jumlah Kelompok Tani Seluruhnya dikali 100 %</b>	<b>Kab. Humbang Hasundutan</b>	<b>20</b>	<b>Persen</b>	<b>20.848.337.500</b>	<b>DAU</b>
	1	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Kelompok Tani</b>	<b>Jumlah Sarana Pertanian</b>	<b>Kab. Humbang Hasundutan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>11.153.230.900</b>	<b>DAU</b>
	1.1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kelompok Tani	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Humbang Hasundutan	2	Laporan	7.153.230.900	DAU

	1.2	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kelompok Tani	Jumlah Sarana Pertanian yang dibagikan ke kelompok tani Tahun n	Kab. Humbang Hasundutan	1	Laporan	4.000.000.000	DAK
	2	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme</b>	<b>Luas Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</b>	<b>Kelompok Tani</b>	<b>Jumlah Luas Tanam dan Intensifikasi Tahun n</b>	<b>Kab. Humbang Hasundutan</b>	<b>5030</b>	<b>Hektar</b>	<b>9.695.106.600</b>	<b>DAU</b>
	2.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kelompok Tani	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Tumbuhan Tahun n	Kab. Humbang Hasundutan	2	Dokumen	9.695.106.600	DAU
<b>VI</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>		<b>Persentase Kelompok Tani yang Memperoleh Bantuan Prasarana Pertanian</b>	<b>Kelompok Tani</b>	<b>Jumlah Prasarana Pertanian yang dibagikan kepada Kelompok Tani dibagi dengan Jumlah Kelompok Tani Seluruhnya dikali 100 %</b>	<b>Kab. Humbang Hasundutan</b>	<b>10</b>	<b>Persen</b>	<b>7.484.283.000</b>	<b>DAK</b>
	1	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun</b>	<b>Kelompok Tani</b>	<b>Jumlah Prasarana Pertanian yang dibnagun pada Tahun n</b>	<b>Kab. Humbang Hasundutan</b>	<b>19</b>	<b>unit</b>	<b>7.484.283.000</b>	<b>DAK</b>
	1.1	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	Kelompok Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun Tahun n	Kab. Humbang Hasundutan	10	unit	1.261.250.000	DAK
	1.2	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun	Kelompok Tani	Jumlah Embung yang dibangun Tahun n	Kab. Humbang Hasundutan	7	Unit	950.000.000	DAK
	1.3	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Pertanian	Jumlah JUT yang dibangun	Kelompok Tani	Jumlah JUT yang dibangun Tahun n	Kab. Humbang Hasundutan	25	unit	5.273.033.000	DAK
<b>VII</b>	<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>		<b>Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Kelompok Tani</b>	<b>Luas yang dikendalikan dibagi dengan luas cakupan bantuan sarana pengendalian bencana pertanian dikali 100 persen</b>	<b>Kab. Humbang Hasundutan</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>445.362.600</b>	<b>DAU</b>
	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota	Luas Pengendalian dan Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Kelompok Tani	Luas Lahan yang dilaksanakan Gerdal	Kab. Humbang Hasundutan	40	Ha	445.362.600	DAU
	1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	Kelompok Tani	Luas Lahan yang dikendalikan dari serangan OPT	Kab. Humbang Hasundutan	40	Ha	445.362.600	DAU

VIII		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerima Penyuluhan Pertanian	Kelompok Tani	Jumlah WKPP/Jumlah Kelompok Tani seluruhnya dikali 100 %	Kab. Humbang Hasundutan	80	Persen	2.615.161.889	DAU & IPDMIP
	1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kelompok Tani	Jumlah PPL yang menyusun e-rdkk, simluhtan, poligon, verval, dan data pertanian lainnya	Kab. Humbang Hasundutan	100	Persen	2.615.161.889	DAU, IPDMIP, DAK
	1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok Tani	Jumlah BPP	Kab. Humbang Hasundutan	10	unit	323.046.000	DAU & DAK NF
	1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok Tani	Jumlah BPP	Kab. Humbang Hasundutan	10	unit	1.397.597.000	DAU & IPDMIP
	1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	Kelompok Tani	Jumlah Penyuluh Pertanian dan BPP	Kab. Humbang Hasundutan	10	unit	894.518.889	DAU &DAK
JUMLAH TOTAL									41.600.457.432	

Doloksanggul, 20 Juli 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN



Ir. JENTER MARBUN, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670409 199302 1 001